

SELEKSI KOMISIONER KPID, KETUA DPRD SUMBAR DILAPORKAN KE OMBUDSMAN

Jum'at, 04 Februari 2022 - Marisya Fadhila

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Supardi dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Sumbar. Supardi dilaporkan terkait dugaan tidak adanya keterbukaan publik dalam proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) periode 2021-2024.

Plh Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar Yunesa Rahman menjelaskan, Supardi dilaporkan oleh masyarakat atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran (AMPP) Sumbar. Pelapor adalah ketua AMPP Eko Kurniawan yang datang ke Ombudsman Kamis (3/1/2022).

"Laporan terkait KPID, dia menyampaikan masalah transparansi rekrutmen komisioner KPID. Mereka meminta agar dilakukan sesuai undang-undang, mereka merasa ada yang tidak transparan disampaikan ke publik," katanya Jumat (4/2/2022).

Mereka melaporkan karena mulai dari pencalonan oleh panitia seleksi (Pansel) komisioner hingga pengajuan ke Gubernur tidak ada transparansi. Tanpa ada keterbukaan tiba-tiba sudah ada saja surat keputusan penetapan komisioner.

Pihaknya dari Ombudsman telah menerima laporan tersebut. Selanjutnya memasuki proses diverifikasi secara materil dan formil.

Ombudsman akan melihat kelengkapan laporan hingga kewenangannya dalam menangani laporan. Jika mereka memiliki kewenangan, akan dilakukan klarifikasi ke pihak terkait seperti Gubernur maupun ke DPRD.

"Kalau memang lengkap dokumennya, kami punya waktu 14 hari menindaklanjuti laporan masyarakat. Nanti kita lakukan pleno untuk memutuskan tindaklanjutnya," ujarnya.

Sementara, jika ditemukan kekurangan dokumen, pelapor bakal diberikan waktu satu bulan untuk melengkapi. Kemudian kalau diproses dengan cepat, maka diproses secara bertahap sesuai undang-undang.

Diketahui, DPRD Sumbar mengumumkan penetapan hasil fit and proper test calon anggota Komisioner KPID Sumbar 2021-2024, sebanyak tujuh orang dan enam orang calon komisioner cadangan. penetapan itu tertuang dalam SK Ketua DPRD Nomor 165/367/Persid-2021 tertanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani Ketua DPRD.

Hingga berita diturunkan, Langgam.id belum mendapat konfirmasi dari Ketua DPRD Sumbar Supardi. Upaya konfirmasi akan terus dilakukan.

